

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

REKA NURCAHYA UTAMA
NPM. 0871010063

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Disusun Oleh :

REKA NURCAHYA UTAMA
NPM. 0871010063

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Pembimbing

Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP.1960625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

REKA NURCAHYA UTAMA
NPM 0871010063

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 4 September 2012
Menyetujui,

Pembimbing

Tim Penguji

Wiwin Yulianingsih, SH, Mkn.
NIP/NPT 3 7507 07 0225

Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Mas Anienda Tien F, SH.,MH.
NIP/NPT 3 7709 07 0223

Wiwin Yulianingsih, SH, Mkn.
NIP/NPT 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

REKA NURCAHYA UTAMA
NPM 0871010063

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 30 Juli 2012

Pembimbing

Tim Penguji

Wiwin Yulianingsih, SH, Mkn.
NIP/NPT 3 7507 07 0225

Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Mas Anienda Tien F, SH.,MH.
NIP/NPT 3 7709 07 0223

Wiwin Yulianingsih, SH, Mkn.
NIP/NPT 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Surat Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Reka Nurcahya Utama
Tempat/ Tanggal Lahir	: Surabaya, 29 September 1990
NPM	: 0871010063
Konsentrasi	: Perdata
Alamat	: Jalan Simpang Darmo Permai Selatan VII/54, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS” dalam rangka
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil
karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan
hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat) maka saya
bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
PEMBIMBING

Surabaya, 25 Juli 2012
PENULIS

Wiwin Yulianingsih,SH,Mkn.
NIP/NPT 3 7507 07 0225

Reka Nurcahya Utama
NPM. 0871010063

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Alhamdulillahirobbil alamin segala puji syukur kehadiran ALLOH SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ”

Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan Tugas Akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Meski telah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk tidak membuat banyak kesalahan dalam menyusun Skripsi ini, namun dalam kenyataannya tetap tidak dapat dihindari. Dan penulis harapkan segala kekurangan dan kesalahan dapat disempurnakan untuk masa selanjutnya.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, pengarahan, bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Gendut soekarno, Ms. selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., Msi. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH., M.kn selaku Dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
7. Bapak Sariyanto, SH. Selaku KaTU serta seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu urusan administrasi.
8. Kedua orang tua, Abi dan Umi serta saudara-saudara yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
9. Bapak Miftachul Machsum, SH. selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surabaya dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur yang telah berkenan membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam penulisan Skripsi.

10. Ibu Setiawati Sabarudin, SH. selaku Notaris dan PPAT yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
11. Seluruh karyawan dan Staff Kantor Wilayah INI dan IPPAT Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam mencari data dalam penulisan Skripsi.
12. Rekan-rekan kerja karyawan Notaris yang telah memberikan dukungan dan usulan-usulan dalam penulisan Skripsi.
13. Kawan-kawan seperjuangan dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Saran dan Kritik yang sifatnya membangun penyusun harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Surabaya, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Lokasi Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.5.1 Manfaat Teoritis	5
1.5.2 Manfaat Praktis	6
1.6 Kajian Pustaka	6
1.6.1 Tinjauan Umum tentang Notaris.....	6
1.6.1.1 Pengertian Notaris	6
1.6.1.2 Jabatan atau Kedudukan Notaris	7

1.6.1.3	Wewenang Notaris	9
1.6.1.4	Fungsi Notaris	10
1.6.2	Tinjauan Umum mengenai Akta	11
1.6.2.1	Pengertian Akta Otentik	11
1.6.2.2	Akta di bawah tangan	12
1.6.2.3	Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti	12
1.6.2.4	Macam Akta Notaris	13
1.6.2.5	Bentuk dan sifat Akta Notaris	17
1.6.3	Tinjauan Umum mengenai Waarmerking	20
1.6.3.1	Verklaring Van Visum atau Waarmerking	23
1.6.3.2	Legalisasi	24
1.6.4	Kode Etik Notaris	26
1.6.4.1	Jenis-jenis Sanksi bagi Notaris	28
1.6.5	Beberapa Pengertian	29
1.6.6	Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas	31
1.6.6.1	Pengertian Majelis Pengawas.....	31
1.6.6.2	Fungsi Majelis Pengawas	32
1.6.6.3	Wewenang Majelis Pengawas Notaris	33
1.6.6.3.1	Majelis Pengawas Daerah	34
1.6.6.3.2	Majelis Pengawas Wilayah.....	37
1.6.6.3.3	Majelis Pengawas Pusat	38
1.6.7	Teori Perlindungan Hukum	38
1.7	Metode Penelitian	39

1.7.1	Metode Pendekatan Masalah	40
1.7.2	Spesifikasi Penelitian	40
1.7.3	Sumber dan Jenis Data	41
1.7.4	Teknik Pengumpulan Data	43
1.7.5	Teknik Analisis Data	43
1.7.6	Sistematika Penulisan	44
1.7.7	Waktu Penelitian	45
 BAB II PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT		
	UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA AUTHENTIK	46
2.1	Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Sanksi Administratif	49
2.2	Aspek Tanggung Gugat Notaris dalam Sanksi Perdata	52
2.3	Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Sanksi Pidana	55
 BAB III UPAYA HUKUM OLEH NOTARIS YANG MELAKUKAN		
	KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA	68
3.1	Aspek Perlindungan Hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)	72
3.1.1	Aspek Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana	78
3.1.2	Aspek Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Digugat secara Perdata	84
3.1.3	Upaya Hukum Notaris dalam Banding Administratif	86

BAB IV PENUTUP	91
4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Reka Nurcahya Utama
Npm : 0871010063
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 29 September 1990
Program Studi : Perdata
Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

ABSTRAKSI

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, salah satu aktivitas hukum dalam masyarakat sebagai subjek hukum adalah dalam hal perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang kemudian disebut akta. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan upaya Notaris sebagai pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap pengawas notaris di Majelis Pengawas Daerah Kota Surabaya, analisa data yang digunakan menggunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta sosial yang timbul di masyarakat. Dalam UUN dan Kode Etik Organisasi Notaris, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pembuatan akta. Setelah pengucapan sumpah/janji pengangkatan. Notaris berkewajiban: bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Bentuk pertanggungjawaban itu dalam bentuk pertanggungjawaban Administratif, Perdata dan Pidana. Selain itu, Notaris merupakan pejabat umum telah diberikan sebuah kesempatan untuk melakukan Upaya Hukum dengan prosedur tersendiri jika notaris tersebut terkena sanksi atau terbukti bersalah berdasarkan keputusan instansi yang berwenang.

Kata kunci: pembuatan akta, pertanggungjawaban notaris, upaya hukum notaris.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam diktum penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Adapun salah satu aktivitas hukum dalam masyarakat sebagai subyek hukum adalah dalam hal perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang kemudian disebut akta. Akta, atau disebut juga akte, ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta itu bila dibuat dihadapan Notaris namanya akta notarial, atau akta Authentik, atau akta Notaris.¹

Akta itu dikatakan autentik kalau dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Authentik itu artinya sah. Karena Notaris itu adalah pejabat yang berwenang membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta autentik atau akta itu sah.²

¹ Kohar A, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hal 7.

² Ibid, hal 3.

Di dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165 (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang berbunyi sebagai berikut:

“akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta”.

Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Panitera, Jurusita, Kantor Catatan Sipil (yang disetujui Walikota), Hakim dan sebagainya.

Sering orang membuat perjanjian, ditulis sendiri oleh pihak-pihak, tidak dibuat dihadapan Notaris. Tulisan yang demikian disebut akta dibawah tangan. Dibawah tangan ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda “Onderhands”.³

Ada kalanya akta yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di Notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta dibawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap Notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh Notaris.⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya

³ Ibid

⁴ Ibid

ditulis (PJN), yang sekarang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN.

Sebagai pejabat umum seorang Notaris dalam melaksanakan tugas, dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UUJN tentang Jabatan Notaris, maka Undang-undang yang berlaku sebagai landasan seorang Notaris adalah PJN yang merupakan hasil warisan dari zaman Kolonial Belanda. Di dalam Peraturan Jabatan Notaris, diatur tentang, antara lain :

1. Siapa yang berhak diangkat menjadi Notaris;
2. Hak dan Kewajiban;
3. Wilayah Kerja;
4. Cara Pembuatan standar Akta;
5. Cap Notaris, dan lain-lain

Sedangkan di dalam UUJN diatur juga mengenai:

1. Organisasi Notaris;
2. Majelis Pengawas;
3. Lembaga yang mengangkat Notaris;
4. Syarat-syarat diangkat sebagai Notaris, dan lain-lain.

Membandingkan PJN dengan UUJN, terdapat beberapa perbedaan tetapi sifatnya saling melengkapi satu sama lain dan lebih menekankan pada fungsi, hak dan kewajiban bagi seorang Notaris serta lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan keberadaan Notaris selaku pejabat umum.

Beberapa hal menarik yang diatur di dalam UUJN adalah adanya lembaga Majelis Pengawas yaitu adalah suatu lembaga yang dipercaya oleh Pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol kerja dari para pejabat ini. Untuk mencegah timbulnya unsur-unsur rekayasa, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam tubuh Majelis Pengawas, maka Majelis Pengawas ini diambil dari beberapa lapisan

golongan masyarakat praktisi yang ada antara lain Akademis, Praktisi, dan Pemerintah.. Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah setempat dan pejabat yang terpilih dari oleh Ketua Majelis Pengawas.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak Majelis Pengawas dalam melakukan tugas pengawasannya, antara lain :

1. Berupa teguran tertulis atau lisan dan disertai pemanggilan;
2. Jika teguran tidak diindahkan maka Majelis Pengawas dapat merekomendasikan pemecatan.

Hanya saja di dalam Undang-undang Notaris baik Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang saat ini ada, tidak diatur dengan jelas mengenai bagaimanakah seorang Notaris tersebut selaku Pejabat umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila ia melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam membuat akta, hanya disebutkan bahwa seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat suatu akta yang dimohon dan seorang Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta otentik yang bertentangan dengan UUN?

2. Bagaimana upaya hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta terdapat kesalahan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dan ;
2. Untuk mengetahui upaya hukum oleh Notaris sebagai pejabat negara apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta berdasarkan UUNJ.

1.4 Lokasi Penelitian

Penulis menyusun penelitian skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ini berlokasi di Majelis Pengawas Daerah Kota Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya tentang Notaris dalam rangka pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ;
2. Sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ;
3. Disamping itu bermanfaat pula bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa notaris dan ;
2. Bagi notaris dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran yang berharga agar resiko yang ada ketika melaksanakan profesinya dapat di minimalisir, dengan jalan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum tentang Notaris

1.6.1.1 Pengertian Notaris

Seorang Notaris dalam pengertian umum adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁵

Meski demikian tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat/petunjuk hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan

⁵ Indonesia Legal Center Publishing, Himpanan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris & PPAT, Jakarta, Karya Gemilang, hal 37.

dengan suatu perjanjian-perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Apabila peranan Notaris diperbandingkan dengan peranan pengacara, kepentingan kedua belah pihak, manakala seorang pengacara hanya mengabdikan kepada kepentingan kliennya serta berkewajiban untuk memenangkan hak klien atas hak lawannya. Seorang Notaris harus berikhtiar sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak merasa puas. Dengan demikian, maka seorang Notaris pada pokoknya bertujuan untuk menghindarkan timbulnya sengketa, sedang seorang pengacara bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul.⁶

1.6.1.2 Jabatan atau Kedudukan Notaris

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan Organ Negara, yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas-kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta.

Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam Pengaturan Notaris di Indonesia dan UUJN merupakan

⁶ Soekanto Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hal 195.

hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pengertian Jabatan harus berlangsung terus menerus dapat di berlakukan pada Notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari Jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris. Sedangkan Notaris sebagai Jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang Protokolnya.

UUJN tidak saja mengatur mengenai Jabatan atau kedudukan Notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan Jabatan Notaris dan pertanggungjawabannya.

Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN.

Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti melaksanakan kewenangan Notaris serta Notaris Pengganti Khusus

berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN. Batas kewenangan Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris.

Pengganti Khusus berbeda. Batas kewenangan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan Notaris Pengganti Khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.

1.6.1.3 Wewenang Notaris

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Didalam menjalankan profesinya Notaris tidak saja mendengarkan apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan didalam aktanya, tetapi Notaris mencantumkan pula hal-hal yang tidak dikemukakan oleh kliennya tetapi tersirat didalam keterangan yang diberikan kliennya. Disamping itu sebagai pejabat, Notaris adalah orang kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien dan menjabarkannya lebih lanjut didalam akta

Notaris. Semuanya ini dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) UUJN yang berbunyi sebagai berikut, Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat lainnya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

1.6.1.4 Fungsi Notaris

Fungsi yang dijalankan Notaris bersifat publik berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN karena masyarakat dalam hal ini cukup minta bantuan Notaris sebagai layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau juru sita namun perbedaannya bahwa Notaris mendapat honorarium berdasarkan Undang-undang, yang menyatakan bahwa seorang Notaris menggaji dirinya sendiri, dari honorarium atas jasa hukum yang diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

Kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya menguruskan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.

1.6.2 Tinjauan Umum mengenai Akta

1.6.2.1 Pengertian Akta Otentik

Menurut Kamus Hukum pengertian akta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.⁷ Sedangkan pengertian Authentik atau otentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁸

Yang disebut akta Otentik pada hakekatnya memuat suatu kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat

⁷ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal 5.

⁸ Ibid, hal 11.

menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditanda tangannya.⁹

1.6.2.2 Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

1.6.2.3 Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :¹⁰

- a. Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum.

⁹ Indonesia Legal Center Publishing, Op.Cit, hal 38.

¹⁰ Eleanora M Pangkabila, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan Di Daerah Hukumnya, jurnal ilmiah UNUD, edisi April 2012, Vol.03, ISSN 2252-380 X, hal. 4.

- c. Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

1.6.2.4 Macam Akta Notaris

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan;¹¹

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.

Sedangkan otensitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) UUIJN jo. Pasal 1868 KUHPdata, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, kewenangan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUIJN, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan

¹¹ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1986, hal 475.

grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga aktanya yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (relaas akta) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (partij akta), Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh (door) Notaris sebagai pejabat umum.

Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris dalam suatu akta otentik, akta ini disebut pula akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui ada dua bentuk akta notaris yaitu :¹²

1. Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten).
2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten).

Akta dibuat oleh Notaris apabila seorang Notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. Notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan Notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual

¹² G.H.S. Lumban Tobing, “Peraturan Jabatan Notaris”, Erlangga, Jakarta, 1982, hal 51.

beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh Notaris, akan tetapi dibuat di hadapan Notaris.¹³

Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain, Dalam golongan akta yang dimaksud pada nomor 2 termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Dalam akta partij ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Di dasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan Berita Acara rapat para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan

¹³ Kohar A, Op.Cit, hal 25.

didalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (ambtelijk akte) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.¹⁴

1.6.2.5 Bentuk dan Sifat Akta Notaris

Pada umumnya akta Notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah :

- a. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat

¹⁴ Ibid, hal 53.

tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.

- b. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai Bentuk dan sifat Akta Notaris, yang berisi ;

1. Awal akta atau kepala akta memuat :
Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap
dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili ;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap ;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan ;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan , jabatan, kedudukan,dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.

- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan ;
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparisi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada Notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam akta otentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparisi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir akta

ialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris yang bersangkutan.

Tugas Notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya, Notaris hanya mengkonstansir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, di dalamnya serta mencatatnya dalam akta berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3.¹⁵

Adapun yang dimaksud Akta Otentik yang termuat dalam Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :¹⁶

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.
- b. Dibuat oleh Pejabat Umum.
- c. Pejabat umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat.

1.6.3 Tinjauan Umum mengenai Waarmerking

Ketentuan paling tua yang mengatur tentang Waarmerking dapat ditemukan dalam Engelbrecht 1960 hlm.1753, yakni ordonansi stbl.1867-29 yang berjudul :

Bepalingen nopens de bewjskrscht van onderhandse geschriften van indonesiers of met hen gelijkgestelde personen,

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 123.

¹⁶ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Pokok-pokok Hukum Perdata, Op.Cit, hal 59.

Atau dalam bahasa Indonesia :

Ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan yang dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka.

Di dalam Pasal 1 ditentukan, bahwa cap jempol disamakan dengan tanda tangan hanya apabila cap jempol itu diWaarmerk (yang bertanggal) oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang di tunjuk dalam ordonansi dalam keterangannya harus dinyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau orang itu diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskan (voorhouden) kepada itu, setelah itu orangnya membubuhkan cap jempolnya di hadapan pejabat itu.

Setelah ordonansi itu diubah dengan stbl.1916-46 jo.43, Pasal 1 ayat (2), Tentang Wewenang Legalisasi dan Waarmerking hanya menentukan bahwa sebuah cap jempol/jari tanda tangan orang termasuk golongan hukum pribumi dan mereka yang disamakan di bawah wesel, surat order, aksep, surat-surat atas nama pembawa (aan toonder), dan surat-surat dagang lainnya, disamakan dengan sebuah akta di bawah tangan, asalkan akta itu diberi waarmerking oleh seorang Notaris atau pejabat yang di tunjuk oleh Pemerintah, bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau sidik jari atas tanda itu, bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada orang itu dan akhirnya, cap jempol atau sidik jari itu dibubuhkan di hadapan pegawai

itu, di sinilah baru untuk pertama kali seorang Notaris diberi hak untuk melegalisasi akta dibawah tangan.¹⁷

De Bruyn Mgz memakai dua istilah Verklaring van visum dan “legalisasi” Dengan Verklaring van visum De Bruyn mengartikan waarmede dan ia menjelaskan bahwa maksud Verklaring van visum itu tidak lain memberi tanggal pasti, ia memakai kata-kata date certain yaitu keterangan bahwa Notaris telah melihat (gezein) akta dibawah tangan itu pada hari itu, sudah tentu kata De Bruyn tanggal yang diberi itu tidak lain dari tanggal ketika Notaris melihatnya bukan dari tanggal yang ia sukai atau diminta kleinnya.¹⁸

Karena Verklaring van visum ini hanya memberi tanggal pasti, maka tanda tangannya yang tertera di atas surat di bawah tangan itu tidak pasti tetap dapat disangkal oleh orangnya atau ahli warisnya, tetapi tanggal tidak dapat disangkal.

Dengan Legalisasi (legalisatie) De Bruyn mengartikan suatu tindakan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :¹⁹

- a. Bahwa Notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya;
- b. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (voorhouden) kepada orangnya; dan

¹⁷ De Bruyn Mgz dikutip kembali Thong Kie, Tan, Studi Notariat, Serba serbi praktek Notaris, Edisi Baru. Ichtiat baru van hoeve, Jakarta, 2000, hal 123.

¹⁸ Ibid, hal 238.

¹⁹ Ibid, hal 238.

c. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris ;

Hal tersebut di atas ini harus disebut oleh Notaris dalam keterangannya dalam akta di bawah tangan itu, tanda tangan yang dilegalisasi demikian kata De Bruyn tidak dapat disangkal kecuali keterangan Notaris dituduh sebagai keterangan palsu.²⁰

Akhirnya ditulis oleh De Bruyn bahwa kekuatan legalisasi antara lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang dihadapan Notaris.²¹

Banyak Notaris minta agar diadakan dua saksi yang juga turut menandatangani akta itu, menurut De Bruyn hal ini tidak perlu karena suatu legalisasi adalah keterangan seorang Notaris pribadi (een personele verklaring) bukan akta Notaris.²²

1.6.3.1 Verklaring Van Visum atau Waarmerking

Seseorang memberikan kepada Notaris Akta sudah ditandatangani, dalam hal ini Notaris tidak lain hanya dapat memberi tanggal waarmerken yang disebut oleh De Bruyn Verklaring van visum dan yang hanya memberi tanggal pasti atau date certain penulis menyamakannya dengan waarmerking. Waarmerken secara demikian tidak mengatakan sesuatu mengenai siapa yang

²⁰ Ibid, hal 236.

²¹ Ibid, hal 236.

²² Ibid, hal 238.

menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Waarmerken ini dilakukan oleh Tan Thong Kie dengan catatan di atas akta ;²³

Contoh Waarmerking Versi Tan Thong Kie;

Didaftarkan (gewaarmerkt) untuk memberi tanggal pasti pada hari tanggal
Tanda tangan Notaris dan Cap Jabatan

1.6.3.2 Legalisasi

Akta di bawah tangan yang belum ditanda tangani diberikan kepada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh orangnnya setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris (voorhouden) kepadanya.

Dalam kasus ini, tanggal dan tanda tangan adalah pasti karena isi akta dijelaskan oleh Notaris, maka penanda tangan tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang ditandatangani dan penanda tangan adalah benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan ini. Untuk Legalisasi ini Tan Thong Kie menulisnya di bawah akta dan biasanya berbunyi²⁴;

Saya Notaris di Menerangkan telah menjelaskan isi akta ini kepada Yang dikenal (diperkenalkan kepada) saya, Notaris, setelah itu , menanda tangannya di hadapan saya, Notaris.
Surabaya,
Tanda Tangan Notaris
Cap Jabatan.

²³ Ibid, hal 239.

²⁴ Ibid, hal 239.

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap/tapak jempol/jari (vingeratdruk) yang “gewaarmerkt” oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (voorgehouden) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris.²⁵

Didalam Pasal 15 ayat (2) UUJN juga diatur mengenai Coppie Collationee dan Pengesahan Fotokopi selain kewenangan yang tersebut di atas.

Coppie Collationee merupakan membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; Coppie Collationee ini membuat asli surat-surat yang pernah dibuat dan hendak dipergunakan lagi seperti halnya surat kuasa yang dilekatkan pada Minuta akta Notaris atau dengan kata lain surat kuasa atau surat di bawah tangan lainnya yang diketik ulang, maka agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, maka Notaris membuat Kopi dari asli surat di bawah tangan (Coppie Collationee), pada akhir atau penutup akta ini disebutkan dibuat sebagai Coppie Collatione.

²⁵ Kohar A, Op.Cit, hal 4

Coppie Collatione ada 2 (dua) macam, yaitu;

1. Coppie Collatione dari Surat di bawah tangan yang telah dilekatkan pada minuta akta Notaris.

Rumusannya;

Di keluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya “Coppie Collatione” dari Surat kuasa di buat di bawah tangan, tertanggal, yang telah di jahitkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor Tanggal (tanggal ini beda dengan tanggal surat kuasa)

Notaris di

Tanda tangan

Cap Jabatan

2. Coppie Collatione dari Surat di Bawah Tangan yang setelah di cocokan dengan aslinya di kembalikan lagi kepada yang berkepentingan;

Rumusannya;

Di keluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya “Coppie Collatione” dari Surat kuasa dibuat di bawah tangan, tertanggal, setelah dicocokkan maka asli surat tersebut diserahkan kembali kepada yang berkepentingan.

Surabaya,

Tanda Tangan

Cap Jabatan

1.6.4 Kode Etik Notaris

Notaris sebagai sebuah organisasi profesi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tetap wajib bergabung dalam sebuah wadah induk organisasi Notaris tersebut. Kebutuhan akan organisasi Notaris ini diperuntukkan untuk menjalin hubungan yang emosional diantara para

anggota Notaris tersebut. Selain itu, organisasi ini akan mengeluarkan suatu kode etik yang dijadikan pedoman dalam melakukan tugasnya.²⁶

Etika Profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam kode etik.²⁷

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris berdasar keputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus.²⁸

Organisasi Notaris Republik Indonesia yang ada pada dan hingga saat ini, yaitu pendirinya INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai satu-satunya wadah bagi Organisasi Notaris di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁶Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, "Etika Profesi Hukum", UPN Press, Surabaya, 2009, hal 99.

²⁷Liliana Tedjosaputro, "Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana", Bigraf Publishing, 1995, hal. 10.

²⁸Indonesia Legal Center Publishing, Op.Cit, hal 135.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) UUJN:

“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum”.

Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris Pasal 83 ayat (1) UUJN yang di dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 26 Januari 2005 di Bandung telah berhasil untuk mengubah Anggaran Dasar dan Peraturan Kode Etik sesuai dengan UUJN.

Didalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UUJN tentang Organisasi Notaris mengatur :

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
2. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan Organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

1.6.4.1 Jenis-jenis Sanksi bagi Notaris

Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :²⁹

- a. Teguran lisan
- b. Peringatan berupa teguran dalam bentuk tertulis
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. Onzelling (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

²⁹<http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sanksi-administraif-secara-umum.html>, diakses hari Rabu tanggal 20 Juni 2012, pukul 12.15.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

1.6.5 Beberapa Pengertian

1. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
2. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”.
3. Kutipan Akta adalah Kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum “DIBERIKAN SEBAGAI KUTIPAN”.
4. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
5. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
7. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan

jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

8. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
9. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
10. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.
11. Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh dan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.
12. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa Notaris lainnya.

1.6.6 Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas

1.6.6.1 Pengertian Majelis Pengawas

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan terhadap sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUJN :

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris bisa dibilang cukup berat mengingat jumlah Notaris sudah sedemikian banyaknya. Untuk itu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menambah struktur kerja yaitu Seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan Notaris di Subdit Notariat yang berwenang melakukan pengawasan langsung kasus-perkasus atau menerima laporan pengawasan rutin dari Kantor Wilayah Depkeh dan HAM di setiap propinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawasan yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 68 UUJN).

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN.

Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

1.6.6.2 Fungsi Majelis Pengawas

Fungsi Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya. Tetaplah bekerja sesuai peraturan yang berlaku, bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan Notaris dan sesuai wewenang yang telah diberikan oleh Majelis Pengawas.

Berdasarkan UUJN, substansi pengawasan Notaris tersebut juga tidak hanya meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik Jabatan dan aturan hukum lainnya, tapi juga meliputi perilaku Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN.

Bahwa perilaku Notaris yang harus diawasi oleh Majelis Pengawas, antara lain melakukan perbuatan tercela adalah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat berdasarkan Pasal 9 huruf (c) UUJN dan penjelasannya dan Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan Narkoba, dan berzina berdasarkan Pasal 12 huruf (c) UUJN dan penjelasannya.

Bahwa alasan-alasan tersebut jika terbukti dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya oleh Menteri berdasarkan laporan dari Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat).

1.6.6.3 Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Adapun wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang di tujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas

sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan instansi.

Adapun Wewenang Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

1.6.6.3.1 Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Dalam Pasal 66 UUIJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas Jabatan Notaris sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris di gugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan

menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan, dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, penuntut umum dan Hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.

Pasal 70 UUDN :

Majelis Pengawas Daerah, berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan

- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

1.6.6.3.2 Wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Pasal 73 ayat (1) UUJN :

Majelis Pengawas Wilayah, berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - 1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat Berita Acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN).

1.6.6.3.3 Wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Pasal 77 UUJN :

Majelis Pengawas Pusat, berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang, untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Wewenang MPW, MPD dan MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. tahun 2004.

1.6.7 Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum, seperti yang tertulis di dalam kamus bahasa Indonesia Kontemporer bahwa;

“Suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan atau Undang-Undang.”

Sedangkan menurut Kamus Hukum, Perlindungan Hukum adalah :

“Suatu upaya kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan

Negara dan sebagainya atau dapat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara.”

Hadjon menyebutkan, ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, antara lain :³⁰

1. Perlindungan Hukum Prefentif yaitu kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive bertujuan mencegah sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Perlindungan Hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

1.7 Metode Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, terlebih dahulu penulis mengemukakan istilah “metodologi”, berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu melaksanakan suatu prosedur.³¹

³⁰ Eleanora M Pangkabila, Op.Cit, hal. 5.

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal 5.

Metodelogi dapat diartikan juga sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Tujuan dalam sebuah penelitian hanya memerlukan satu tujuan umum, ada juga yang mempunyai beberapa tujuan yang sesuai dengan permasalahan atau subpermasalahan. Tujuan penelitian ini harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, agar dapat memberikan arah pada penelitiannya.

1.7.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, karena penelitian ini tidak hanya meliputi pada Peraturan-peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum di perpustakaan, tetapi juga terhadap prakteknya di lapangan sebagai data penunjang.

Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula sumber data primer sebagai data pendukung dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris berdasarkan UUJN.

1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang pertanggungjawaban Notaris berdasarkan UUJN.

1.7.3 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data meliputi :

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang didapat dengan mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab pada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam proposal ini.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakup literatur-literatur, tulisan ilmiah dari para ahli, dan lain-lain yang dapat penulis kumpulkan dalam menyelesaikan proposal ini.
- c. Data Tersier, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti kamus-kamus yang ada, yang sifatnya hanya sebagai tambahan dan atau melengkapi dalam menyelesaikan proposal ini.

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer :
 1. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)

b. Bahan Hukum Sekunder :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.36.PR.07.02 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Pusat Notaris.
3. SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. :
KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04 – PR.08.05 Tahun 1987 Tentang
Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Notaris.

c. Bahan Hukum tersier :

1. Kamus-kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia Modern.
3. Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.
4. Jurnal/Majalah Berita Bulanan Berita Notaris/PPAT “RENVOP” terbitan
PT. Jurnal Renvoi Mediatama.
5. Majalah Triwulan Ikatan Notaris Indonesia Wahana Informasi dan
Komunikasi “Media Notariat”.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam Skripsi ini, yaitu :

Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hasil penelitian, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Pengolahan data yaitu bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Analisa data yaitu bentuk analisa yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata

kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaannya sebagai sumber data penelitiannya.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Didalamnya memuat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua berisi kajian pustaka yang merupakan uraian teoritis tentang teori dasar yang digunakan sebagai analisa pemecahan hukum yang diteliti. Sub bab ketiga berisi metode penelitian yang berupa cara melakukan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, penarikan kesimpulan selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

BAB II. Untuk menjawab dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum apabila melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik yang bertentangan dengan UUJN. Sub Bab pertama berisi Apek tanggungjawab Notaris dalam sanksi Administratif. Sub Bab kedua berisi Aspek tanggungjawab Notaris dalam sanksi Perdata. Dan Sub bab ketiga berisi Aspek tanggungjawab Notaris dalam sanksi Pidana.

BAB III. Untuk menjawab dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai upaya hukum oleh Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta. Sub Bab pertama berisi Aspek Perlindungan Hukum bagi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sub sub Bab pertama berisi Aspek Perlindungan Hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan tindak Pidana, Sub sub Bab kedua berisi Aspek Perlindungan Hukum bagi Nottaris yang digugat secara Perdata. Sub sub Bab ketiga berisi Upaya Hukum Notaris dalam Banding Administratif.

BAB IV Penutup. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu : sub bab I. Kesimpulan mengenai seluruh pembahasan dan permasalahan yang diteliti, sub bab II. Saran yang mungkin diberikan dari hasil penemuan-penemuan dilapangan yang dianggap bermanfaat secara ilmiah. Dengan demikian bab penutup ini merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.